



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KOMPILASI DATA APLIKASI *E-GOVERNMENT* PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 – 2025



Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau



Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Hendri Kurniadi, S. STP., M.Si

Penyunting : Dwi Anggraini, S.E
Maulana Mohammad Akbar, S.Si

Penulis Naskah / : Maulana Mohammad Akbar, S.Si

Pengolah Data /

Gambar Kulit /

Infografis

Dinas/Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau

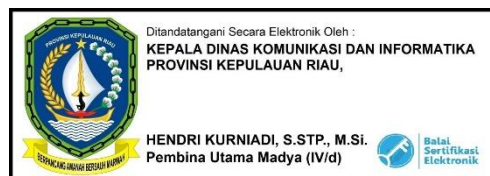
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kegiatan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau ini telah selesai disusun. Laporan ini merupakan hasil akhir dari kegiatan pengolahan data aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau pada periode 2018 – Semester I 2025.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi hasil kegiatan pengolahan data yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus pada analisis data aplikasi E-Government untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Data tersebut telah dianalisis dan diolah dalam bentuk tabel/grafik/diagram yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data. Data pada Laporan ini bersifat dinamis karena dapat berubah setiap kurun waktu baik persemester ataupun pertahun.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan SPBE di Provinsi Kepulauan Riau, maupun sebagai referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Tanjungpinang, 2025



Daftar Isi

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang Kegiatan	1
Tujuan Kegiatan	1
Ruang Lingkup	2
Bab II Metodologi	2
Sumber Data	2
Teknik Pengumpulan Data	2
Metode Analisis	2
Bab III Hasil Analisis	2
Jumlah Aplikasi E-Government yang dikembangkan	2
Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan	3
Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform	6
Jumlah Aplikasi Berdasarkan Kondisi Aplikasi	9
Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Platform	11
Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Kondisi Aplikasi	13
Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform dan Kondisi Aplikasi	14
Bab IV Penutup	15
Kesimpulan	15
Saran	16
Lampiran	17
Standar Data Statistik	17
Infografis	20

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Kegiatan

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan amanat Perpres SPBE No. 82 Tahun 2023 maka perlu melakukan pendataan layanan elektronik berupa jenis pelayanan yang terdiri dari layanan pemerintah dan layanan masyarakat, jenis platform yang digunakan serta kondisi aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, dengan mengetahui tren dan kondisi aplikasi, pemerintah dapat menentukan prioritas pengembangan selanjutnya, menghindari duplikasi aplikasi dan menyesuaikan strategi transformasi digital berdasarkan kebutuhan masyarakat dan internal pemerintahan.

Dari kegiatan ini, aplikasi *E-Government* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan data yang penting dan perlu dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Statistik dari data Aplikasi *E-Government* memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Data dari aplikasi digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.

I.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari adanya kegiatan ini antara lain

1. Melakukan pendataan layanan elektronik.
2. Menganalisis data aplikasi E-Government.
3. Menyediakan data berbasis statistik sebagai pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
4. Menghasilkan output berupa Laporan analisis statistik dan Infografis pendukung untuk Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

I.3. Ruang Lingkup

Aplikasi *E-Government* yang dikembangkan di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – Semester I 2025.

II. METODOLOGI

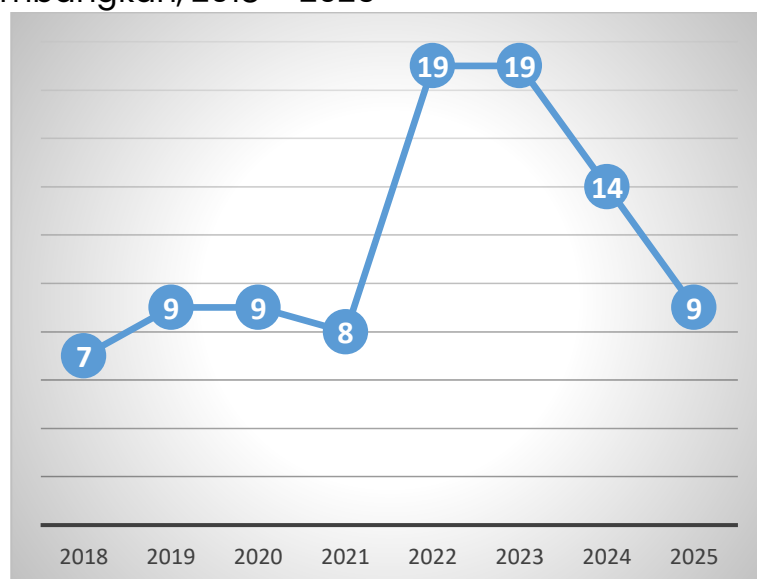
- II.1. Sumber Data: Data Sekunder dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
- II.2. Teknik Pengumpulan Data: Kompilasi data administrasi
- II.3. Metode Analisis: Analisis Deskriptif

III. HASIL ANALISIS

III.1. Jumlah Aplikasi *E-Government* yang dikembangkan

Pada tahun 2018 hingga 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau telah mengembangkan sebanyak 94 aplikasi e-government untuk mendukung tata Kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 94 aplikasi tersebut, akan dianalisis berdasarkan jenis pelayanan, platform dan kondisi aplikasinya.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan, 2018 – 2025



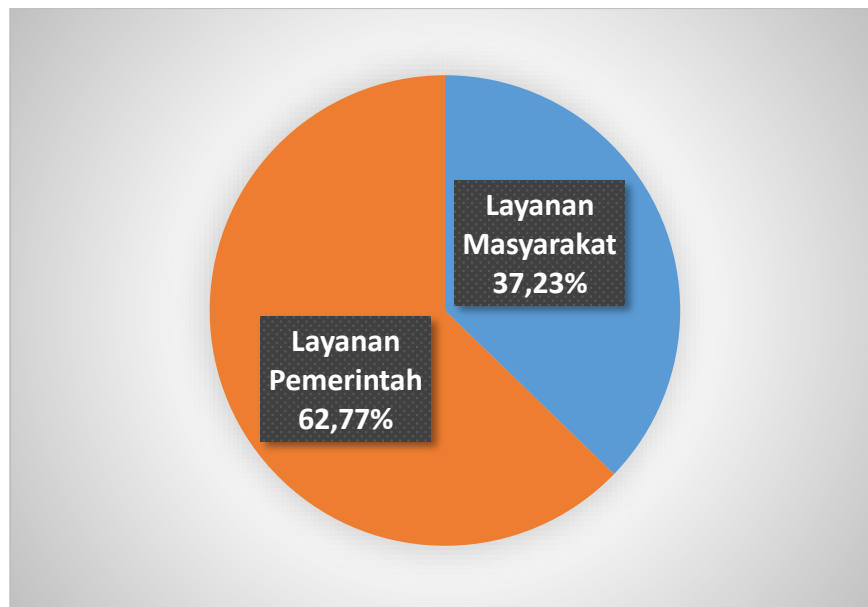
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan gambar 1, jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2018 – 2025 sebanyak 94 aplikasi. Pada tahun 2022 dan 2023 merupakan tahun dengan jumlah aplikasi terbanyak yang dikembangkan dengan jumlah sebanyak 19 aplikasi, hal ini terjadi karena salah satu faktornya antara lain adanya pemulihan pascapandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak instansi mendorong digitalisasi layanan untuk mengurangi interaksi fisik.

III.2. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

Jumlah aplikasi berdasarkan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan banyaknya aplikasi berdasarkan jenis layanan yang terdiri dari layanan pemerintah dan layanan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang komprehensif yang mana pemerintah tidak hanya fokus pada satu jenis layanan, tetapi mengembangkan aplikasi untuk kebutuhan berbagai layanan. Selain itu, adanya segmentasi kebutuhan pengguna yang berarti setiap aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Hal ini menunjukkan pendekatan yang *user-oriented* atau berpusat pada pengguna serta untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi bagi penggunaannya untuk mendukung pelayanan yang efektif, efisien, dan inklusif.

Gambar 2. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan, 2018 – 2025



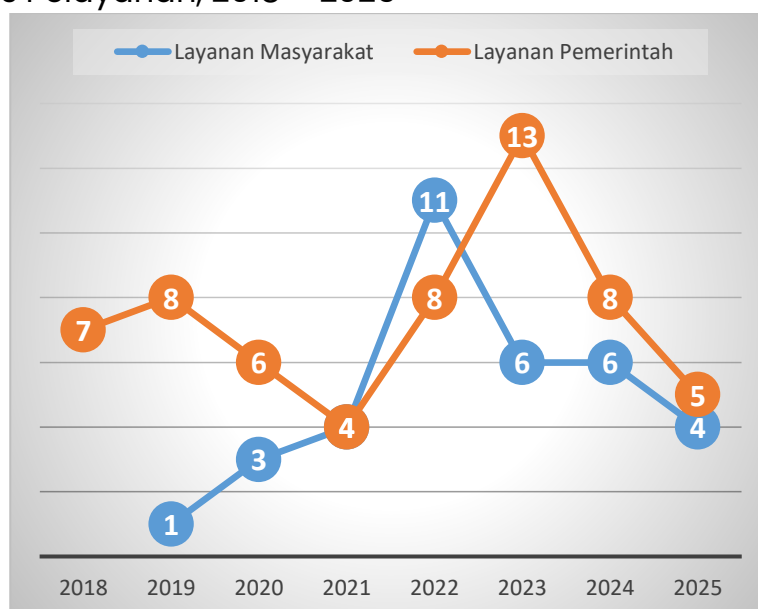
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dari gambar di atas, sebanyak 94 aplikasi *E-Government* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa persentase layanan pemerintah mendominasi dibandingkan layanan masyarakat yakni sebesar 62,77% (59 aplikasi) dan sisanya sebesar 37,23% (35 aplikasi) merupakan layanan masyarakat.

Persentase aplikasi jenis layanan pemerintah lebih banyak dibandingkan persentase layanan masyarakat yang berarti jumlah aplikasi yang digunakan lebih banyak untuk mendukung operasional internal pemerintahan. Setiap instansi atau unit kerja biasanya memiliki kebutuhannya sendiri, sehingga banyak aplikasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan internal tersebut. Selain itu, dikarenakan jumlah instansi dan unit kerja yang sangat banyak sehingga menyebabkan adanya dominasi jumlah aplikasi pemerintahan dibandingkan dengan aplikasi untuk masyarakat atau publik secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di pemerintahan lebih dulu terjadi di

lingkup internal sebelum menyasar masyarakat maupun publik secara luas.

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan, 2018 – 2025



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Tren yang ditampilkan pada grafik di atas menunjukkan kedua jenis layanan mengalami lonjakan pada tahun 2022, dengan layanan masyarakat mencapai 11 aplikasi dan layanan pemerintah 8 aplikasi. Hal ini berkorelasi kuat dengan pemulihan pascapandemi COVID-19, dimana instansi mempercepat digitalisasi layanan. Meskipun adanya fluktuasi pengembangan, yang mana terdapat penurunan jumlah aplikasi layanan masyarakat setelah 2022 yang menandakan kemungkinan transisi fokus ke pemeliharaan atau pengembangan lanjutan dari aplikasi yang sudah ada. Selain itu, secara umum terlihat adanya dominasi layanan pemerintah yang mana jumlah aplikasi layanan pemerintah lebih tinggi dibandingkan layanan masyarakat, terutama di tahun 2023 dengan puncaknya sebanyak 13 aplikasi. Hal ini menunjukkan fokus yang lebih besar pada

pengembangan aplikasi untuk mendukung operasional internal instansi pemerintah.

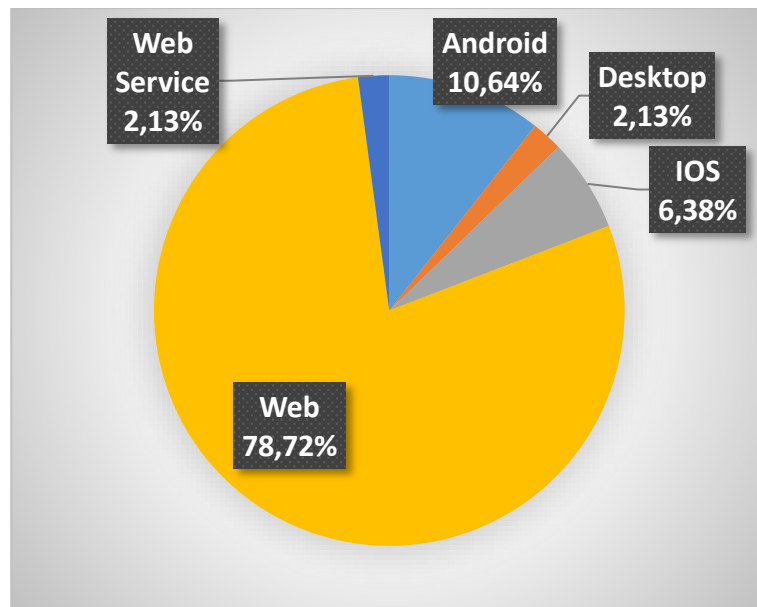
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau secara aktif mengembangkan aplikasi untuk mendukung SPBE, dengan prioritas awal pada layanan pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada tren peningkatan layanan masyarakat yang mencerminkan upaya menuju pelayanan publik yang lebih inklusif dan digital.

III.3. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform

Jumlah aplikasi berdasarkan jenis platform yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan banyaknya data berdasarkan jenis platformnya berupa android, desktop, IOS, web dan web service. Hal ini menunjukkan strategi pemerintah dalam menjangkau pengguna yang berarti pemerintah memilih berbagai platform untuk menyesuaikan perilaku dan kebutuhan pengguna. Selain itu juga mencerminkan upaya agar layanan lebih inklusif dan mudah diakses sesuai perangkat yang digunakan pengguna, serta mencerminkan tingkat kemajuan dan penyebaran teknologi dalam sistem *E-Government*.

Berdasarkan gambar 4, dari 94 aplikasi *E-Government* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa persentase aplikasi berdasarkan jenis pelayanan terbanyak yakni platform web sebesar 78,72% (74 aplikasi), kemudian dilanjutkan dengan platform android sebesar 10,64% (10 aplikasi), platform IOS sebesar 6,38% (6 aplikasi), dan persentase terkecil berupa platform web service dan desktop masing-masing sebesar 2,13% (2 aplikasi).

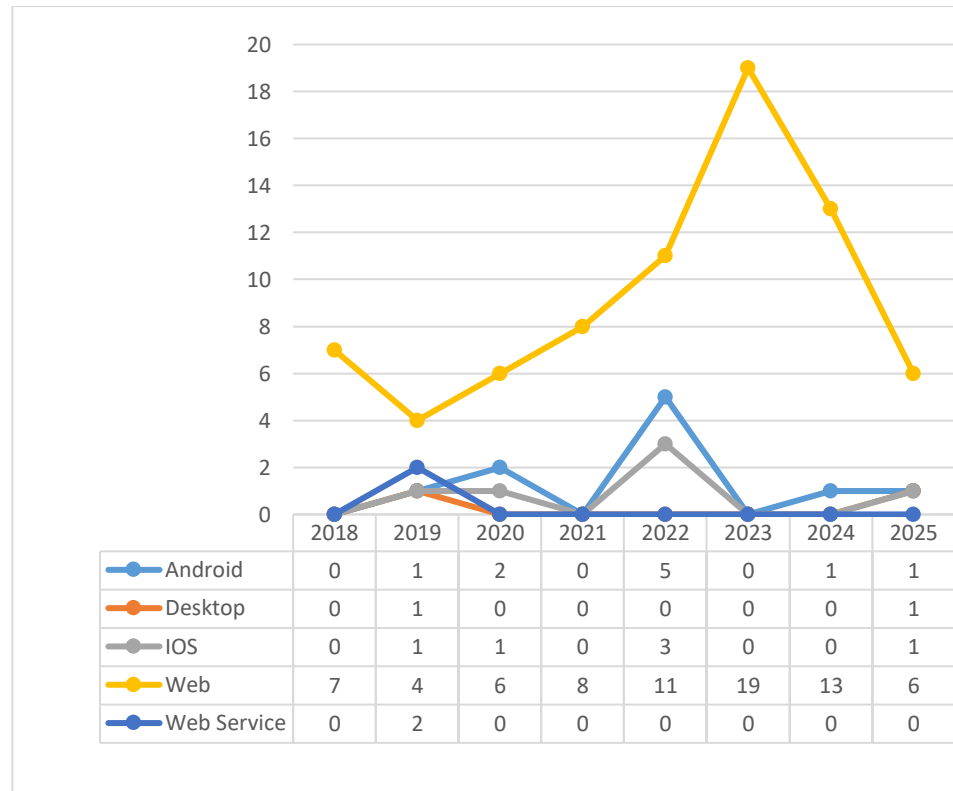
Gambar 4. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform, 2018 - 2025



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Aplikasi *E-Government* berbasis platform web memiliki persentase terbanyak karena aksesibilitas yang luas dan fleksibel yang mana bisa diakses dari berbagai perangkat (komputer, laptop, tablet, hingga ponsel) tanpa perlu instalasi khusus dan hanya memerlukan browser dan koneksi internet, sehingga memudahkan para pengguna untuk mengakses layanan kapan saja. Selain itu, pengembangan dengan platform web ini pengembangannya lebih efisien karena umumnya lebih mudah dan cepat dikembangkan dibandingkan mobile atau desktop serta tidak perlu membuat versi terpisah untuk Android/iOS atau sistem operasi lainnya. Hal ini membuat biaya dan waktu pengembangan lebih rendah. Dari sisi pemeliharaan dan pembaruannya pun cukup mudah karena berbasis server, update aplikasi web bisa dilakukan secara terpusat, tanpa pengguna harus memperbarui secara manual sehingga sangat ideal untuk lingkungan pemerintah yang sering melakukan penyesuaian regulasi dan fitur.

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform, 2018 – 2025



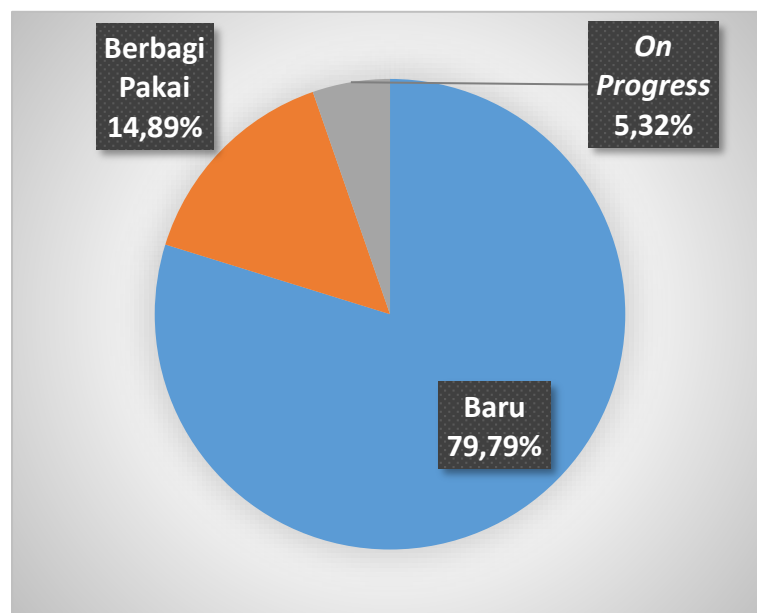
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas menggambarkan pola yang cukup mencolok pada platform web yang mendominasi jumlah aplikasi terbanyak setiap tahun dengan puncaknya pada 2023 sebanyak 19 aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat terhadap pengembangan aplikasi berbasis web karena aksesibilitas yang luas, efisiensi pengembangan dan kemudahan pemeliharaan secara terpusat. Sedangkan untuk platform lainnya cenderung stagnan dari tahun ke tahun, namun terdapat lonjakan di tahun 2021-2022 untuk platform android dan IOS dibandingkan tahun sebelumnya yang berarti pemerintah mulai memfokuskan untuk menjangkau masyarakat secara lebih personal dan fleksibel. Platform desktop dan web service terlihat sangat terbatas jumlahnya, menandakan bahwa penggunaan platform ini bersifat khusus untuk keperluan tertentu.

III.4. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Kondisi Aplikasi

Jumlah aplikasi berdasarkan kondisi aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan banyaknya aplikasi berdasarkan kondisi dari aplikasi yang tersedia saat ini yang terdiri dari kondisi baru, berbagi pakai dan *on progress*. Secara keseluruhan, kondisi aplikasi yang dikembangkan mencerminkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam memperluas dan menyempurnakan sistem *E-Government* secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Gambar 6. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Kondisi Aplikasi, 2018 - 2025



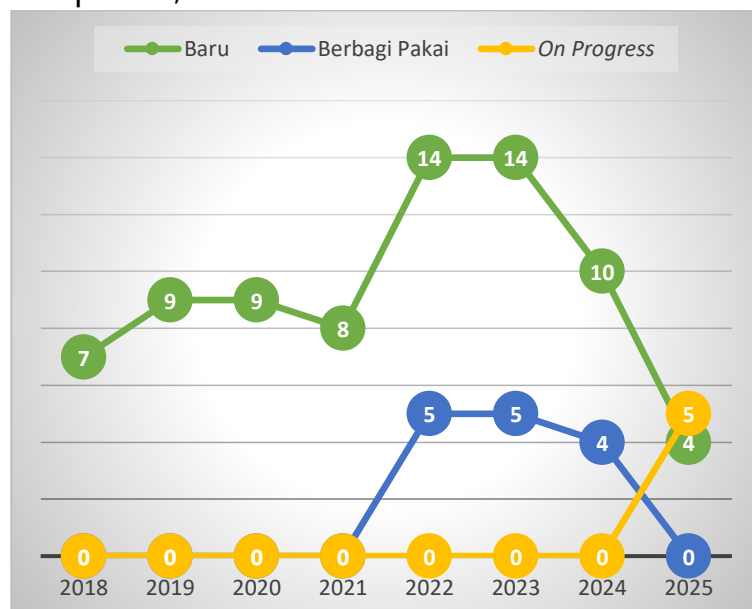
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Pada gambar di atas, dari 94 aplikasi *E-Government* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa persentase aplikasi berdasarkan kondisi aplikasi terbanyak yakni dalam kondisi baru sebesar 79,79% (75 aplikasi), selanjutnya untuk kondisi aplikasi berbagi pakai

sebesar 14,89% (14 aplikasi) dan persentase kondisi terkecil yaitu *on progress* sebesar 5,32% (5 aplikasi).

Aplikasi *E-Government* berdasarkan kondisi baru memiliki persentase terbanyak karena banyak instansi pemerintah daerah mulai menyadari pentingnya layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Selain itu, setelah pandemi terdapat banyak layanan yang sebelumnya manual beralih ke digital, sehingga mendorong pengembangan aplikasi-aplikasi baru. Beberapa aplikasi lainnya yang sudah ada mungkin tidak lagi relevan, tidak memenuhi kebutuhan terkini, atau sulit dikembangkan lebih lanjut, sehingga dibutuhkan aplikasi baru sebagai pengganti. Dengan demikian, tingginya jumlah aplikasi dalam kondisi baru merupakan indikasi dari proses adaptasi dan modernisasi yang sedang berlangsung di lingkungan pemerintah daerah.

Gambar 7. Perkembangan Jumlah Aplikasi Berdasarkan Kondisi Aplikasi, 2018 - 2025



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dari grafik di atas, terlihat bahwa perkembangan aplikasi dengan kondisi baru selalu mendominasi dari

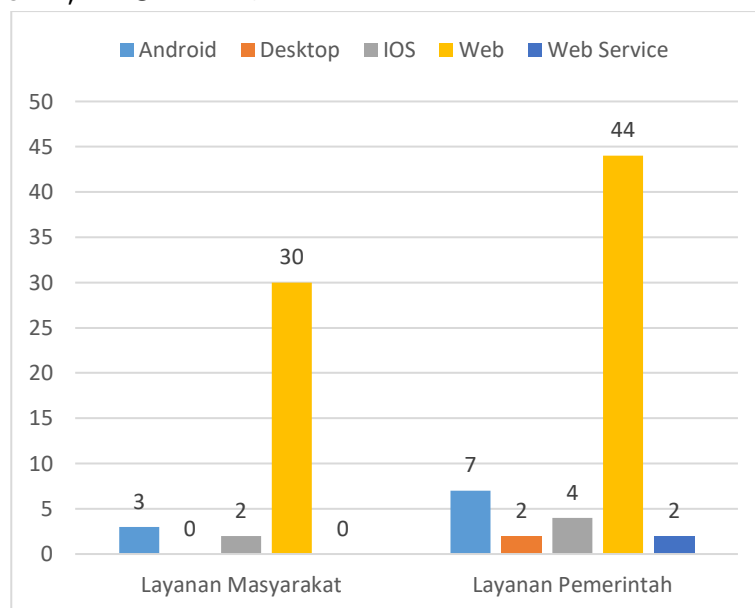
tahun 2018–2024, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 14 aplikasi. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi dalam menghadirkan layanan digital baru, sejalan dengan akselerasi digital pascapandemi COVID-19. Untuk jumlah aplikasi berbagi pakai pada tahun 2022–2023 masing-masing sebanyak 5 aplikasi dan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 4 aplikasi. Hal ini menunjukkan jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau untuk digunakan oleh instansi pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan. Aplikasi dalam kondisi *on progress* baru muncul di tahun 2025 sebanyak 5 aplikasi, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat sejumlah aplikasi yang sedang dalam tahap pengembangan dan belum dirilis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi *E-Government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mengalami masa puncak pada 2022–2023 dan peralihan ke pengembangan aplikasi baru yang masih *on progress* pada 2025.

III.5. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Platform

Jumlah aplikasi berdasarkan jenis pelayanan dengan platform yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa adanya strategi pemerintah dalam menyesuaikan platform berdasarkan target pengguna dan jenis layanan yang berarti bahwa pemilihan platform aplikasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna akhir.

Gambar 8. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Pelayanan dan Platform, 2018 – 2025



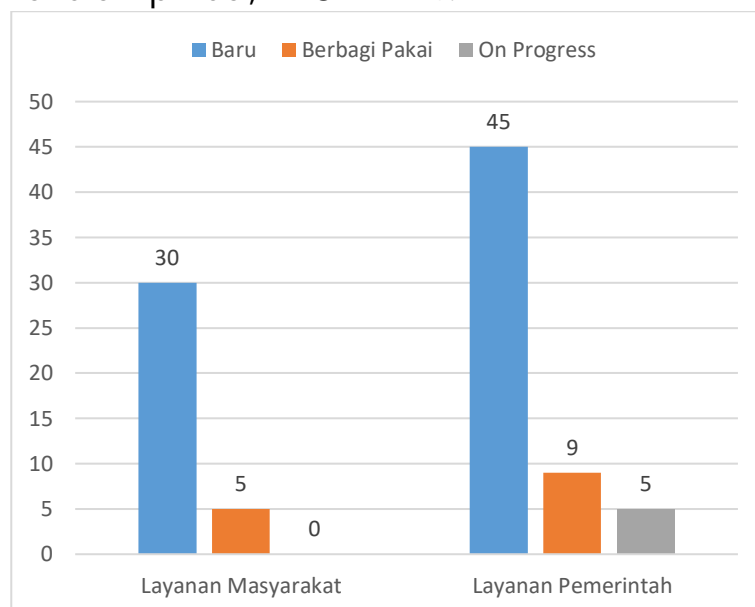
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Adanya fakta menarik muncul dari diagram di atas bahwa kondisi dari 94 aplikasi *E-Government* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau terlihat dominasi platform web untuk kedua jenis layanan yaitu pada layanan pemerintah sebanyak 44 aplikasi dan pada layanan masyarakat sebanyak 30 aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi berbasis web lebih diprioritaskan untuk kemudahan akses dan jangkauan yang luas, baik oleh masyarakat umum maupun instansi pemerintah. Pada diagram tersebut juga terlihat jelas bahwa layanan pemerintah memiliki cakupan pengembangan aplikasi yang lebih luas dibandingkan layanan masyarakat. Selain itu, penggunaan platform *mobile* (android dan IOS) masih belum dominan, menandakan potensi untuk ekspansi di masa mendatang terutama untuk pelayanan publik yang berbasis *mobile*.

III.6. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Kondisi Aplikasi

Jumlah aplikasi berdasarkan jenis pelayanan dan kondisi aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bagaimana setiap jenis layanan memiliki dinamika pengelolaan aplikasi yang berbeda. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara inovasi, keberlanjutan, dan tantangan pengelolaan, serta menekankan pentingnya evaluasi, integrasi, dan efisiensi dalam transformasi digital pemerintahan.

Gambar 9. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Kondisi Aplikasi, 2018 – 2025.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

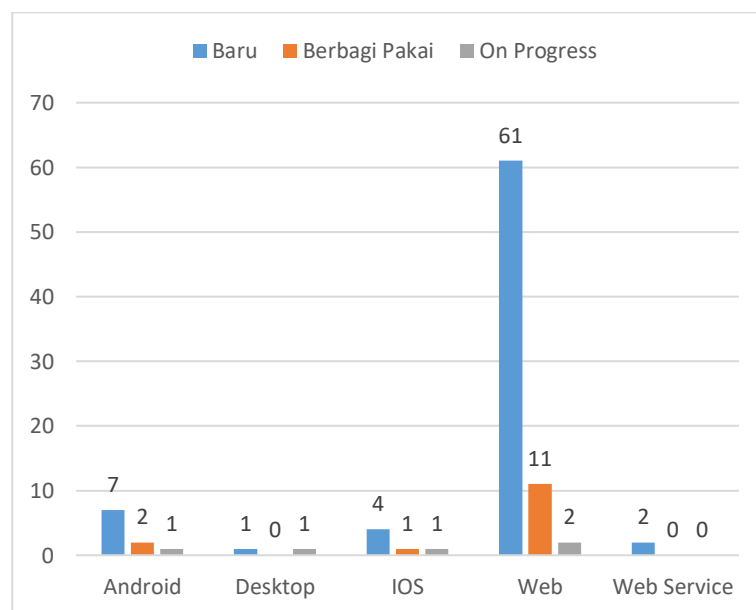
Berdasarkan gambar 9 dari 94 aplikasi *E-Government* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa aplikasi baru mendominasi pada kedua jenis layanan masing-masing sebanyak 45 aplikasi untuk layanan pemerintah dan sebanyak 30 aplikasi untuk layanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi lebih banyak difokuskan pada pembuatan sistem baru, baik untuk layanan publik

maupun internal pemerintahan. Layanan pemerintah terlihat lebih aktif dalam pengembangannya baik dalam bentuk aplikasi baru, berbagi pakai, maupun yang masih *on progress*.

III.7. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform dan Kondisi Aplikasi

Jumlah aplikasi berdasarkan jenis platform dan kondisi aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa adanya dinamika dalam siklus aplikasi digital, termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi maupun perubahan teknologi.

Gambar 10. Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Platform dan Kondisi Aplikasi, 2018 – 2025



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Pada gambar di atas, dari 94 aplikasi *E-Government* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa berdasarkan platform yang tersedia, aplikasi dengan kondisi baru berbasis web sangat mendominasi pengembangan aplikasi. Aplikasi kondisi baru dengan

platform web terdapat sebanyak 61 aplikasi, jauh lebih banyak dibanding platform lain yaitu pada platform android sebanyak 7 aplikasi, platform IOS sebanyak 4 aplikasi, platform web service sebanyak 2 aplikasi dan platform desktop sebanyak 1 aplikasi. Hal ini berarti bahwa platform web menjadi fokus utama pengembangan, karena sifatnya yang fleksibel dan mudah diakses lintas perangkat. Hal yang sama juga terjadi pada aplikasi dengan kondisi berbagi pakai dan *on progress* dimana platform web paling banyak dikembangkan.

IV. **PENUTUP**

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah aplikasi *E-Government* yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2018–2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Total 94 Aplikasi e-Government telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2018–2025 untuk mendukung implementasi SPBE dan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
2. Puncak pengembangan aplikasi terjadi pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan percepatan digitalisasi sebagai dampak dari adaptasi pascapandemi Covid-19, terutama dalam upaya mengurangi interaksi fisik melalui layanan digital.
3. Aplikasi layanan pemerintah mendominasi (62,77%) dibandingkan aplikasi layanan masyarakat (37,23%), karena banyaknya kebutuhan aplikasi internal instansi dan birokrasi yang kompleks di lingkup pemerintahan.
4. Platform web merupakan jenis platform paling dominan (78,72%) dalam pengembangan aplikasi karena lebih

- fleksibel diakses dari berbagai perangkat, hemat biaya pengembangan, dan mudah diperbarui secara terpusat.
5. Berdasarkan kondisinya, aplikasi dengan kondisi baru (79,79%) paling banyak dibandingkan kondisi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya fokus besar pada pengembangan aplikasi baru dibandingkan pembaruan atau pemeliharaan terhadap aplikasi yang lama.

IV.2. Saran.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan, maka disampaikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan pengembangan ke depan sebagai berikut:

1. Mengingat dominasi aplikasi baru dan tren penurunan pengembangan aplikasi baru di tahun 2025, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau bisa melakukan konsolidasi aplikasi untuk menghindari tumpang tindih fungsi, mengintegrasikan sistem yang serupa ke dalam satu platform terpusat berbasis Web untuk efisiensi serta bisa menerapkan interoperabilitas melalui Web Service agar sistem yang berbeda dapat saling terhubung.
2. Saat ini platform Android dan iOS masih relatif kecil kontribusinya. Oleh karena itu, bisa mengembangkan aplikasi *mobile* untuk layanan masyarakat yang sering diakses dan memprioritaskan pengembangan aplikasi yang ringan dan *user-friendly* untuk Android maupun iOS.
3. Laporan ini menunjukkan pentingnya data aplikasi sebagai landasan transformasi digital sehingga harus memperkuat strategi untuk perencanaan SPBE dengan cara membangun dashboard monitoring aplikasi SPBE berbasis data *real-time* dan menggunakan data statistik aplikasi sebagai bahan evaluasi kinerja SPBE tiap tahun.

Lampiran 1. Standar Data Statistik

Standar Data Statistik (SDS)

No.	Nama Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pelayanan	Jumlah Aplikasi; Jenis Pelayanan	Banyaknya satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE berdasarkan jenis Perihal atau cara melayani	Total	Aplikasi	Layanan Masyarakat; Layanan Pemerintah;
2	Jumlah Aplikasi Berdasarkan Platform	Jumlah Aplikasi; Platform	Banyaknya satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE berdasarkan infrastruktur yang bertindak sebagai struktur dasar di mana aplikasi dan teknologi dikembangkan atau dijalankan untuk memungkinkan operasi	Total	Aplikasi	Android; Desktop; IOS; Web; Web Service

			bisnis yang lebih efektif dan efisien.			
3	Jumlah Aplikasi Berdasarkan Kondisi Aplikasi	Jumlah Aplikasi; Kondisi; Aplikasi	Banyaknya satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE berdasarkan keadaanya.	Total	Aplikasi	Baru; Berbagi Pakai; <i>On Progress</i> .
4	Jumlah Aplikasi	Jumlah Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	Total	Aplikasi	-
5	Platform	Platform	Infrastruktur yang bertindak sebagai struktur dasar di mana aplikasi dan teknologi dikembangkan atau dijalankan untuk memungkinkan operasi bisnis yang lebih efektif dan efisien.	-	-	Android; Desktop; IOS; Web; Web Service
6	Kondisi Aplikasi	Kondisi; Aplikasi	Keadaan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE	-	-	Baru; Berbagi Pakai; <i>On Progress</i> .

8	Jumlah	Jumlah	Banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu)	-	-	-
9	Aplikasi SPBE	Aplikasi SPBE	satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE	-	-	-
10	Pelayanan	Pelayanan	Perihal atau cara melayani	-	-	Layanan Masyarakat; Layanan Pemerintah.
11	Kondisi	Kondisi	Persyaratan / keadaan	-	-	-



MeLUR
BERSERI



PERKEMBANGAN APLIKASI *E-GOVERNMENT*

Provinsi Kepulauan Riau (2018–2025)



Pemulihan pascapandemi Covid-19 mendorong digitalisasi layanan.

Web
74

Android

10

Desktop

2

IOS

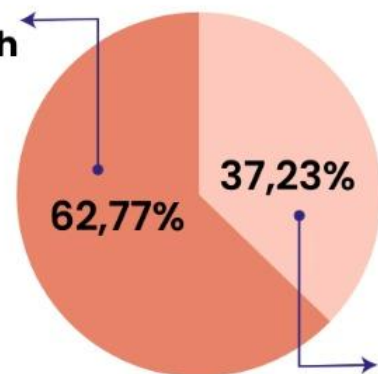
6

Web
Service

2

Jenis Platform

Layanan
Pemerintah



Layanan
Masyarakat

Jenis Layanan